# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Implementasi Strategi Sistem Informasi Manajement Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Strategi merupakan kesatuan arah organisasi yang memberikan pengarahan dalam mengarahkan sumber daya. Strategi juga adalah penentuan cara yang harus dilakukan, supaya memungkinkan untuk memperoleh hasil yang efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Strategi penggunaan Simtan dalam proses meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Kemajuan teknologi dan informasi tersebut diaplikasikan dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Pertanian (Simtan) yang berbasis pada penggunaan teknologi komputer. Aplikasi teknologi ini diimplementasikan sebagai bentuk nyata pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Pertanian yang baik, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan informasi dan pengarahan kepada para masyarakat tentang pertanian.

Sistem informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama untuk menuju terciptanya sistem informasi yang optimal, efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat

merupakan bentuk penyesuaian dalam rangka mewujudkan praktik pemerintah yang lebih efektif dan efisien, sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Informasi.

Dinas Pertanian menyelenggarakan pemerintahan yang baik *(good governance)* dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien diperlukan adanya pengelolaan berupa *website,* infrastruktur yang baik dan jaringan komputer yang baik serta pemeliharaan yang teratur dapat menunjang penyelenggaraan *e-Governmment* dan manajemen sistem informasi yang komprehensif dapat menunjang keberhasilan dinas dalam rangka memberikan layanan informasi yang optimal kepada seluruh pengguna data dan informasi.

Simtan adalah suatu sistem untuk memfasilitasi pelayanan di bidang pertanian misalnya mengembangkan sistem informasi di Jawa Barat, meningkatkan jejaring trafik data informasi antar *stackholder* di setiap kabupaten di Jawa Barat dan mempermudah pengguna tani dalam mengakses data informasi pertanian, mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Simtan diharapkan dapat memberikan pelayanan dalam meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan pelayanan publik, dan dapat mengembangkan aplikasi-aplikasi strategi yang baru.

Simtan dalam implementasinya terdiri dari adanya komponen yang berupa aplikasi informasi pertanian dengan menggunakan sistem komputer yang memberikan berbagai informasi pertanian. Komponen tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut: aplikasi informasi pertanian dibangun dalam rangka urusan pertanian diantaranya, Penanaman padi yang baik .

Bentuk aplikasi data dimasukan ke dalam komputer secara bertahap dan data tersebut masuk ke dalam pengolahan data informasi pertanian untuk diolah. Pengolahan data yang difasilitasi dengan aplikasi layanan informasi pertanian, pelaporan dan penyebaran informasi untuk kepentingan internal maupun eksternal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik khususnya di bidang pertanian Provinsi Jawa Barat.

### 4.1.1 Penyesuaian Struktur dengan Strategi untuk Implementasi Kebijakaan Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Strategi implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik dan efektif bila implementasi strategi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sudah ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Strategi yang direncanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat adalah pengembangan struktur organisasi sistem informasi data pertanian.

Oleh karena itu, untuk mencapai suatu strategi harus ada struktur organisasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan provinsi Jawa Barat salah satunya dengan membuat sistem informasi manajemen pertanian yang berguna untuk mempermudah pengguna tani dalam mengakses data informasi pertanian, mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Simtan diharapkan dapat

memberikan pelayanan dalam meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan pelayanan publik, dan dapat mengembangkan aplikasi-aplikasi strategi yang baru.

Struktur birokrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibawahnya terdapat sekretaris dan di bawahnya terdapat seksi-seksi dan Sub Seksi lainnya. Bagian-bagian tersebut menjalankan tugas secara professional dan memerlukan keaahlian yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap atau integritas yang tinggi.

Dalam struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi jawa Barat, Kepala Dinas membawahi empat bidang, yakni Kepala Bidang Sumber Daya, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Kepala Bidang Produksi Hortikultura, dan Kepala Bidang Bina Usaha.

Bidang Sumber Daya membawahi tiga seksi, yakni Seksi Sarana dan Permodalan, Seksi Kelembagaan Pertanian, dan Seksi Tata Guna Lahan dan Air. Sedangkan Bidang Produksi Tanaman Pangan membawahi tiga seksi Serealia, seksi Palawija, dan Seksi Pengendalian OPT Pangan.

Bidang Produksi Hortikultura membawahi tiga seksi, yakni seksi Sayuran dan Biofarmaka, seksi Buah-buahan dan  Tanaman Hias, dan Seksi Pengendalian OPT Hortikultura. Bina Usaha membawahi tiga seksi, yakni seksi Penanganan Mutu Hasil, seksi Pasca Panen, dan Seksi Pemasaran.

Untuk membantu kelancaran tugas-tugas pimpinan, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibantu oleh sekretaris. Sekretaris membawahi tiga sub-bagian, yakni sub-bagian Perencanaan dan Program, sub-bagian Keuangan, dan sub-bagian Kepegawaian dan Umum.

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan implementasi kebijakan Simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, sehingga di dalam struktur organisasi berusaha untuk menggabungkan tiga wewenang sekaligus, yakni wewenang fungsional, lini, dan staf.

Penyusunan struktur organisasi tersebut merupakan bagian dari strategi organisasi untuk memberikan pelayanan kepada publik secara optimal. Jumlah bagian, sub-bagian, dan seksi, serta fungsional disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Garis komando dan garis koordinasi disusun secara jelas untuk memudahkan jalur birokrasi, baik dalam bentuk pelaporan, komando maupun koordinasi.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Handoko (2003 : 167) bahwa, dalam penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Selain itu, dalam penyusunan struktur memperhatikan dua aspek, yakni departementalisai dan pembagian kerja. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan secara bersama. Sedangkan pembagian kerja merupakan pemerincian tugas pekerjaan agar setiap

individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Menurut Chandler (1962) hubungan struktur dan strategi organisasi sangat erat, karena struktur yang dibuat mengikuti strategi. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun diantara para kepala bagian dan para kepala seksi.

Struktur organisasi dalam pembuatan Simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sudah dibuat menurut kerja masing-masing aparatur bagian admin Simtan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas. Dalam implementasi kebijakan Simtan, penyelenggaraan informasi manajemen pertanian cukup harmonis dan kondusif, dengan kerja sama yang diterapkan secara kekeluargaan antara sesama aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat para pegawai atau aparatur telah melaksanakan tugas sesuai dengan standard, mekanisme, dan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan, karena para aparatur telah terikat dengan sumpah jabatan dan komitmen sebagai pengabdi masyarakat dan mengutamakan kepentingan serta menjaga kepuasan masyarakat dlam memberikan pelayanan publik.

### 4.1.2 Pelembagaan Strategi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Strategi yang telah dibuat oleh Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat berkaitan dengan implementasi kebijakan Simtan adalah membuat kerangka struktur organisasi pelaksana Sistem Informasi Manajemen Pertanian, sehingga memiliki pelaksana yang jelas dan dapat mempermudah pelaksanaan layanan informasi pertanian kepada masyarakat.

Pembentukan lembaga dan wadah yang menangani Simtan akan memudahkan pelayananan kepada masyarakat sekaligus akan memudahkan dalam melakukan pengendalian kegiatannya. Masing-masing aparatur di Dinas Pertanian Tanaman Pangan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga aparatur tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan menjadi tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.

Pembentukan kelompok kerja (Pokja) Sistem Informasi Manajemen Pertanian (Simtan) di Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan usaha dan komitmen Dinas untuk menyediakan jasa layanan informasi pertanian kepada masyarakat pengguna, yakni para petani secara terbuka.

Pokja Simtan diketuai oleh Kasubag Perencanaan dan Program. Ketua Pokja membawahi Admin Dinas, Admin Jaringan, Admin Website, dan beberapa operator, yakni operator data statistik, operator pangan untuk pengendalian OPT Pangan, untuk seksi palawija, seksi serelia, operator hortikultura untuk Seksi Sayuran dan Biofarmaka dan Seksi Perlindungan Tanaman, dan Seksi Buah dan

Tanaman Hias. Operator Sumber Daya untuk seksi PLA, seksi Sarana dan Permodalan, Seksi Kelembagaan Pertanian, Operator Bina Usaha untuk Seksi Pasca Panen dan Seksi Pemasaran, dan Seksi Penanganan Mutu Hasil, Operator Keuangan dan Operator Keuangan.

Dari paparan yang telah digambarkan di atas, membuktikan bahwa penanganan Simtan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan kegiatan yang sungguh-sungguh dengan menempatkan beberapa operator komputer pada masing-masing seksi untuk meningkatkan kelancaran dalam pelayanan kepada publik.

Penunjukan personil dalam wadah Kelompok Kerja (Pokja) Simtan dipandang sudah cukup tepat, karena di tangan Pokja kelancaran pelaksanaan kegiatan Simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Strategi dalam implementasi kebijakan Simtan merupakan aspek utama dalam *e-Government*. Pada level ini dianalisa seberapa jauh pemerintah serius memahami, menginginkan, dan memiliki konsep yang benar mengenai *e-Government* yang akan diimplementasikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat empat sub-aspek yang perlu dikaji antara lain :

1. *E-Vision* berkaitan dengan apakah pemerintah dan stakeholdersnya telah memiliki visi dan misi yang jelas mengenai cita-cita untuk merencanakan, membangun, dan mengembangkan *e-Government* yang telah disosialisasikan, dipahami, didukung oleh seluruh jajaran peemrintahan.

2. *Governance* berkaitan dengan adanya lembaga yang didukung oleh seluruh institusi pemerintahanuntuk bertindak sebagai pemimpin, coordinator, dan fasilitatot seluruh proyek yang berkaitan dengan pencapaiam visi dan misi *e-Government* yang telah direncanakan.
3. Strategies, *Plan* dan *Policies* berkaitan dengan telah dikembangkannya proses perencanaan, strategi, dan kebijakan *e-Government* yang sejalan dan merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional secara umum.
4. *Resource Commitment* berkaitan dengan kenyataan pengalokasian sumber daya-sumber daya strategis sebuah Negara pada proyek-proyek *e-Government.*

### 4.1.3 Pengoperasionalan Strategi merupakan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Operasionalisasi strategi dalam implementasi kebijakan Simtan berpedoman kepada: *pertama,* rencana strategis yang terdiri dari pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. *Kedua,* rencana kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Lebih rinci pelaksanaan secara operasional dari strategi yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam *Standar Operasional Prosedur* (SOP).

SOP di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pimpinan dan staf untuk menuju memberikan informasi pertanian baru dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

SOP di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat berfungsi sebagai berikut: *pertama*, memperlancar tugas petugas atau pegawai, tim atau unit kerja, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. *Kedua*, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak bila terjadi penyimpangan. *Ketiga*, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Maksud dari adanya SOP di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat adalah guna meningkatkan pelayanan informasi.

Pelayanan informasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yaitu memberikan kemudahan pengguna tani dalam mengakses data informasi pertanian dan memberikan pelayanan yang sama terhadap setiap masyarakat yang ingin mengetahui informasi di bidang pertanian. Dalam hal ini peran dari struktur dan strategi penting dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian untuk meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada rencana kinerjanya. Rencana kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat mencakup sasaran,

program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan melihat Rencana Strategis (Renstra). Sasaran dalam Renstra disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kompetensi aparatur dibidang pelayanan informasi manajemen pertanian dalam meningkatkan pelayanan informasi terhadap masyarakat di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

### 4.1.4 Penggunaan Prosedur untuk Memudahkan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan telah ditetapkan, artinya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagian kinerjanya. Apabila mereka melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas yang diberikan oleh Aparatur Kepala Dinas Pertanian kepada aparatur yang melanggarnya. Hal

tersebut dilakukan agar mereka bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing, sehingga tidak ada satu aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pertanian kepada masyarakat dan berpedoman kepada tujuan organisasi seperti SOP yang telah dibentuk, yaitu dengan mewujudkan pelayanan yang profesional. Seluruh aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dapat memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan SOP *(Standard Operating Prosedure).*

SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuannya. Selain itu, SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

SOP yang disusun mengacu pada, *pertama*, rencana strategis yang terdiri dari pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. *Kedua,* rencana kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dibutuhkan SOP untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan, agar dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pertanian

tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan menurut peraturan yang ada. Mereka juga menjalankan tugas secara profesional, hal tersebut dilakukan bertujuan agar pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pertanian dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas bahwa proses SOP merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pelayanan informasi. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat mempunyai struktur birokrasi yang lengkap dan terdiri dari Kepala Dinas, sekretaris dan seksi-seksi lainnya. Setiap aparatur yang terdapat di struktur birokrasi mempunyai tugas atau pekerjaannya masing-masing, sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas atau pekerjaan yang bukan bagiannya. Tetapi didalam kenyataanya SOP tersebut sedang diperbaiki sehingga Oprasional kinerja Simtan belum berjalan dengan efektif.

Kegiatan yang dilaksanakan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) merupakan rincian yang sistematis dari sebuah program yang akan diimplementasikan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indicator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (*inputs*), keluaran (*ouputs*), dan hasil (*outcomes*). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur di bidang pelayanan informasi terhadap masyarakat oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

## 4.2 Pengorganisasian Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dalam Meningkatkan pelayanan informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Pengorganisasian merupakan tahapan dan fungsi manajemen yang kedua setelah perencanaan. Pada tahapan inilah pimpinan mengatur dan menyusun personil untuk melaksanakan tugas dan beban pekerjaan yang harus dikerjakan. Selain itu, setiap orang diberi beban pekerjaan, tugas, wewenang, dan kewajibannya serta garis komando serta koordinasi antara satu bagian dengan bagian lainnya yang saling berkaitan.

### 4.2.1 Desain Organisasi dan Struktur Organisasi di dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Desain organisasi merupakan rancangan organisasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal dimana organisasi dikelola. Struktur organsisasi juga merupakan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, posisi-posisi, maupun orang-oramg yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur tersebut mengandung unsure-unsur spesialisasi kerja, standar spesialisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran (ukuran) satuan kerja.

Struktur organisasi dalam pembuatan Simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sudah dibuat menurut kerja masing-masing aparatur bagian admin Simtan yang telah disahkan oleh kepala Dinas. Dalam melaksanakan penyelenggaraan informasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pertanian cukup harmonis dan kondusif, dengan kerja sama yang diterapkan secara kekeluargaan antara sesama aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan provinsi Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat aparatur telah melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan, serta memahami bahwa aparatur merupakan pengabdi masyarakat dan mengutamakan kepentingan serta menjaga kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Struktur birokrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, bahwa aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat bertugas sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat di kepalai oleh seorang Kepala Dinas, di bawahnya terdapat sekretaris dan di bawahnya terdapat seksi-seksi dan Sub Seksi lainnya. Bagian-bagian tersebut menjalankan tugas secara profesional yaitu perlu keahlian atau pengetahuan, keterampilan dan integritas yang tinggi. Hal ini dilakukan bertujuan agar pelaksanaan Implementasi Simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Penyusunan struktur organisasi yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat mengacu dan memperhatikan faktor-faktor utama yang menentukan dalam perancangan struktur organisasi melalui (a)

Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya (b) Teknologi yang digunakan (c) Anggota (karyawan) dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi (d) Ukuran organisasi. (Handoko ,2003 : 169-170)

### 4.2.2 Pembagian Pekerjaan dan Desain Pekerjaan Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Tujuan suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan, dimana setiap individu tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri. Dua orang atau lebih yang saling bekerja sama dan melalui satu koordinasi dapat mencapai suatu hasil yang lebih optimal dibandingkan dilakukan secara sendiri, sehingga dapat menghasilkan sebuah sinergi. Sedangkan desain pekerjaan merupakan penetapan tanggung jawab kerja setiap individu. Artinya, setiap individu memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Seorang pimpinan dan bawahan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Desain pekerjaan dipengaruhi oleh struktur dan wewenang organisasi.

Mengacu pada struktur organisasi yang telah ditetapkan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, setiap jenis pekerjaan disebar pada bagian dan sub-bagian organisasi yang menangani pelayanan manajemen informasi pertanian, sehingga personil yang ada sesuai dengan desain pekerjaan yang telah ditetapkan, meskipun tidak semua pegawai menguasai teknologi informasi.

Pihak atasan membagi pekerjaan sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi. Setiap pegawai melaksanakan tugasnya masing-masing dalam rangka memberikan layanan informasi yang berkaitan dengan pertanian kepada masyarakat. Sehingga apa yang dikerjakan oleh para pegawai tidak terjadi tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain.

Pembagian kerja dan desain pekerjaan dalam implementasi kebijakan Simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat menggabungkan beberapa pendekatan dalam desain pekerjaan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hanafi (1997 : 246–250). Pendekatan tersebut menggabungkan pendekatan mekanis, artinya setiap kompleksitas dan kerumitan pekerjaan dipecah ke dalam pekerjaan yang lebih sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dan apabila pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang maka akan lebih efisien, karena karyawan akan lebih mahir dan cepat dalam melaksanakan pekerjaan. Pendekatan kedua, juga menggunakan pendekatan motivasional atau pendekatan karakteristik kerja. Pendekatan tersebut mencakup dimensi kerja pokok yang mencakup lima hal, yakni : variasi, keterampilan, identitas tugas, arti dan pentingnya tugas, otonomi dan umpan balik.Jika kelima dimensi tersebut dilaksanakan, maka karyawan akan merasakan arti pentingnya kerja, merasakan tanggung jawab untuk mencapai hasil tertentu, dan mengetahui perkembangan kerjanya. Pada gilirannya, setiap karyawan akan memiliki motivasi dan kepuasan kerja yang sangat tinggi.

Pendekatan yang selaras dan dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat adalah memperhatikan kondisi tubuh manusia,

artinya peralatan, sarana dan prasarana yang digunakan akan menekan kecelakaan kerja, kenyamanan, dan kondusifitas kerja, serta menghindari kelelahan kerja.

Pendekatan yang keempat yang diperhatikan oleh pihak Dinas adalah pendekatan motorik atau perceptual, yakni berkaitan dengan keamanan kerja. Pekerjaan didesain tidak melebihi kemampuan mental pekerja.

Semua pendekatan dijadikan bahan pertimbangan dalam mendesain pekerjaan, sehingga akan menyebabkan produktivitas yang optimal dan tujuan organisasi dapat tercapai, yaitu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat petani, khususnya yang berkaitan dengan Simtan.

### 4.2.3 Integrasi dan Koordinasi dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Kebijakan Sistem Informasi Manajement Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Aparatur merupakan bagian dari organisasi sebagai sebuah wadah bagi dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi pasti memilik pemimpin dan anggota Sebagai makhluk sosial, mereka pasti akan saling berinteraksi. Interaksi antara pemimpin dengan aparaturnya berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itulah, umumnya akan terbentuk aturan yang mengendalikan ketertiban dari interaksi tersebut. Aturan tersebut bisa berupa kesepakatan kerja bersama, bisa juga hasil otoritas pemimpin organisasi itu.

Integrasi sumber daya aparatur melalui Simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sub Bagian Perencanaan dan Program, merupakan cara untuk

menyatukan para aparatur, baik aparatur yang baru ditempatkan maupun aparatur yang melalakukan program pelatihan di suatu tempat. Penyatuan sumber daya aparatur merupakan penyesuaian pola pikir aparatur untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai kepentingan bersama. Penyatuan aparatur memang tidak mudah dilakukan, membutuhkan waktu yang cukup lama supaya aparatur tersebut mau bekerja sama dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Karena para aparatur tersebut mempunyai pikiran, perasaan harga diri, dan sifat yang berbeda serta mempunyai latar belakang perilaku keinginan dan kebutuhan yang berbeda ke dalam organisasi.

Hambatan-hambatan tersebut tidak menjadi kendala dalam penyesuaian pola pikir aparatur dalam bekerja, yang bisa terlihat dari tingkah laku pegawai itu sendiri. Semakin lama aparatur tersebut melakukan penyesuaian, diamana pegawai itu ditempatkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan profesional pegawai. Walaupun kenyataannya, tidak mudah untuk mewujudkan profesional pegawai melalui pengintegrasian yang ditetapkan. Dibutuhkan waktu dan pelatihan-pelatihan supaya tujuan tersebut akan tercapai.

Pengintegrasian sumber daya aparatur melalui Simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, merupakan perkembangan terhadap tingkah laku manusia akibat pengaruh teknologi informasi. Dengan adanya pengintegrasian sumber daya aparatur melalui Simtan, para aparatur mempunyai rasa saling ketergantungan satu sama lain terhadap pekerjaannya.

Aparatur yang integrasikan melalui Simtan dilakukan di Sub bagian Perencanaan dan Program supaya data-data pertanian bisa dipantau dengan baik.

Pemantauan data-data pertanian melalui Simtan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan profesional pegawai. Karena pengintegrasian melalui Simtan ini, supaya para pegawai dapat memahami tujuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat khsusnya sub bagian perencanaan dan program untuk mewujudkan profesional pegawai.

***Pertama,*** hubungan antar aparatur melalui Simtan di Sub Bagian Perencanaan Dan Program Provinsi Jawa Barat meliputi usaha untuk memberdayakan pegawai, yang dilakukan melalui penataan pekerjaan yang baik, meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi atuaran, dan melakukan bimbingan. Kemudian, kalau dalam organisasai telah terbentuk serikat pekerja, sehingga organisasi harus melakukan kerja sama antar aparatur yang baik, dalam arti saling menghargai antar aparatur dan organisasi. Hubungan antar aparatur melalui Simtan, semuanya diintegrasikan supaya program kerja yang telah diterapkan bisa dilaksanakan dan berjalan sesuai yang dinginkan.

Pemantauan kerja melalui Simtan ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini perlu dilakukan agar hasil kerja yang dicapai tidak jauh dari target yang diinginkan. Keteraturan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kerja pun dapat terdokumentasikan dengan rapi. Karena data-data pertanian yang disimpan dalam *server database* supaya dokumentasi pegawai tidak hilang begitu saja. Untuk itu pentingnya hubungan aparatur dalam menyikapi pekerjaan dan tujuan oragnisasi ataupun suatu instansi khususnya, bagian perencanaan dan program.

***Kedua,*** motivasi aparatur melalui Simtan di Sub Bagian Perencanaan Dan Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat merupakan hal yang perlu dilakukan agar pegawai dapat merasa diperhatikan dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Motivasi merupakan cara yang digunakan untuk merangsang pegawai untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Pentingnya motivasi bagi aparatur, karena ada hal-hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku aparatur supaya mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk motivasi kepada pegawai tidak bisa disamaratakan, karena karakteristik pegawai berbeda tergantung kondisi sosial dan pendidikannya. Pertimbangan bentuk motivasi dapat menggunakan data yang ada di Simtan, karena dapat mempermudah untuk menemukan data yang menunjukkan karakteristik pegawai.

Integrasi dan koordinasi yang diterapkan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan beberapa teori, yakni pendapat Hanafi (2007 : 276), karena koordinasi mencakup proses menghubungkan atau mengintegrasikan bagian-bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai lebih efektif. Tingkat ketergantungan antar bagian dan kebutuhan komunikasi yang cukup intensif, sehingga kebutuhan akan koordinasi semakin penting. Koordinasi yang efektif tidak mudah dicapai, apalagi pekerjaan semakin terspesialisasi.

### 4.2.4 Perekrutan dan Penempatan Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajement Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini di karenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Sumber daya manusia dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu lembaga birokrasi seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, aparaturnya memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melakukan tugas atau pekerjaan yang ditanganinya. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti kesopanan dalam komunikasi baik bahasa, raut muka dan bahasa tubuh.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, bahwa untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat pelaksanaan yang dilakukanya yaitu: *pertama* melakukan pembinaan pegawai untuk meningkatkan kualitas melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta disiplin dan etos kerja. Dimana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai macam kegiatan seperti *tour of area* dan *tour of duty*.

*Kedua* melakukan pembinaan dan pendidikan pegawai, dimana dapat meningkatkan *profesionalisme* kerja dan pegawai memiliki wawasan yang luas. *Ketiga* pengadaan pegawai, dimana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat tidak dilibatkan secara langsung terhadap pengadaan pegawai, hal ini dikarenakan menjadi kewenangan pusat. Seharusnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dapat dilibatkan secara langsung dalam pengadaan pegawai yang akan bekerja di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, karena aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat mengetahui kreteria calon pegawai yang bagaimana yang bekerja di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

*Keempat* melakukan tindakan disiplin pegawai, adanya tindakan disiplin berupa teguran dan pemecatan terhadap pegawai yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, merupakan tindakan yang benar untuk memotivasi pegawai supaya mematuhi segala peraturan yang berlaku. *Kelima* melakukan kenaikan pensiun pegawai, dimana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat memperhatikan pensiun pegawai yang sudah mengabdikan dirinya untuk bekerja di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

*Keenam* pengelolaan gaji pegawai, adanya pengelolaan gaji pegawai oleh Sub bagian Tata Usaha sudah sesuai dengan tugasnya. Gaji pegawai di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sudah ditentukan dari pusat dan yang membedakannya berdasarkan golongan dan jabatan. *Ketujuh* Kenaikan Pangkat Pegawai, adanya kenaikan pangkat pegawai Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Provinsi Jawa Barat dapat meingkatkan kinerja pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, ketujuh pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau aparatur setempat. Meningkatnya kualitas aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dapat mempermudah dalam memberikan informasi pertanian yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan dari bagian admin Dinas mengenai kemampuan sumber daya manusia atau aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam membuat berita informasi masih terbatas, karena masih kurangnya SDM di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang memberikan informasi.

Oleh karena itu, aparatur adalah unsur penggerak dan pelaksana dari Simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan Simtan adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi yang handal atau aparatur yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah tentang pelayanan Sistem Informasi Manjemen Pertanian tersebut.

Potensi yang handal tersebut di atas dapat dilihat berdasarkan kriteria yang diperlukan, kriteria yang utama diperlukan adalah mereka yang ahli dalam bidang komputer dan mampu untuk mengoperasionalisasikannya serta ahli dalam pelayanan informasi. Masih banyak para aparatur Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Provinsi Jawa Barat yang kurang menguasai komputerisasi, dan banyak juga yang sudah menguasai dan ahli dalam mengoperasionalisasikan komputer.

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat belum dapat dikatakan memadai, karena belum banyak aparatur yang menguasai bidang komputer yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan Simtan. Oleh karena itu pelaksanaan Simtan sudah terlaksana dengan baik tetapi belum maksimal, untuk mengatasinya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat melakukan langkah pelatihan dan pendidikan pegawai untuk lebih ahli dalam bidang komputer yang dapat mendukung keberhasilan Sistem Informasi Pertanahan.

Sumber daya manusia yang diperlukan adalah mereka yang ahli komputer karena akan dijadikan sebagai operator atau tenaga ahli komputerisasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, adanya pelatihan dan pendidikan sedikitnya dapat mengatasi kendala pada bagian pengoperasionalan komputer. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam pengadaan menyediakan ahli komputerisasi diantaranya adalah dengan bantuan tenaga lepas (pihak ketiga) yang berkompeten dalam pengoperasian komputerisasi. Selain harus ahli dalam bidang komputer tentunya sumber daya manusia yang dapat mendukung keberhasilan Simtan, mereka juga harus memahami mengenai informasi di bidang pertanian jadi tidak hanya pintar dalam bidang komputer saja melainkan harus bisa dalam hal administrasi pertanahan.

Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai keberhasilan pelaksanaan Simtan, sumber daya manusia yang diperlukan adalah yang mempunyai keahlian atau yang mampu dalam bidang komputer maupun administrasi pertanahan. Hal tersebut dikarenakan akan sesuai dengan kenyataan yang diperlukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

### 4.2.5 Hak, Wewenang, dan Kewajiban Pegawai Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajement Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Wewenang dalam suatu organisasi merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang ini merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasn ke bawahan dalam organisasi. Barnard (dalam Handoko, 2003 : 213) menyatakan bahwa, seseorang akan bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan apabila memenuhi empat kondisi berikut : (a) dia dapat memahami komunikasi tersebut; (b) pada saat keputusan dibuat dia percaya bahwa hal itu tidak menyimpang dari tujuan organisasi; (c) dia yakin bahwa hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara keseluruhan; dan (d) dia mampu secara mental dan psikis untuk mengikutinya.

Menurut penjelas diatas bahwa aparatur dapat memahami komunikasi yang ada di sekitar kemudian pada saat keputusan dibuat aparatur percaya tidak menyimpang dari tujuan organisasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi secara keseluruhan. Aparatur mampu secara mental dan psikis mengikuti proses tugas yang dilaksanakan

Setiap pegawai pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat memiliki hak, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Misalnya hak yang diterima pegawai adalah mendapatkan gaji yang layak, mendapatkan promosi jabatan bagi pegawai yang berprestasi dan mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan bidangnya.

Selain itu, kewajiban yang dipikul oleh para pegawai adalah memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat petani, khususnya yang berhubungan dengan data-data pertanian. Perkembangan pelayanan yang berbasis *e-Government* yang begitu cepat harus dibarengi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan handal, sehingga para aparatur tidak terkungkung pada jalur birokrasi yang panjang dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Pada hakekatnya, implementasi *e-Government* merupakan tantangan transformasi, sehingga dalam kerangka tersebut teknologi informasi tidak hanya sebagai penunjang manajemen pemerintahan, namun lebih dari sekedar itu,

menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan secara modern dan cepat.

Perubahan demi perubahan global yang sangat pesat jajaran birokrat harus melakukan perubahan dan evolusi untuk menyesuaikan dengan tantangan global. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dituntut untuk melakukan sebuah evolusi *e-Government* yang menurut Indrajit (2007 : 39) terdiri atas empat tahapan, yaitu :

*Tahapan pertama*, bagaimana *e-Government* dapat mengubah prinsip "*service to citizen*" menjadi "*service by citizen"* sehingga fungsi pemerintah berubah dari fungsi sebagai pengatur menjadi fasilitatot bagi masyarakat. Masyarakatlah yang akan mengolah informasi menjadi data yang bermanfaat dan sumber pengambilan keputusan.

*Tahapan kedua*, bagaimana mengubah fenomena dimana dulu masyarakat harus antri untuk mendapatkan pelayanan. Artinya, masyarakat membutuhkan tidak perlu lama untuk mendapatkan pelayanan atau semakin cepat menerima pelayanan.

*Tahapan ketiga*, bagaimana mengatasi permasalahan kesenjangan digital menjadi demokrasi digital. Pada gilirannya, agar tercipta sebuah system informasi digital yang dapat menunjang terciptanya demokratisasi dalam kehidupan bernegara.

*Tahapan keempat*, sejatinya implementasi *e-Government* harus meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan mengubah proses yang manual dengan konsep *Government Online*. Kapan dan dimanapun masyarakat membutuhkan informasi tentang data-data pertanian akan siap terbuka.

Berkaitan dengan paparan di atas, kewajiban setiap aparatur pemerintah untuk bekerja secara optimal sangat perlu dijunjung tinggi, sehingga dapat mengubah paradigm aparat harus dilayani masyarakat menjadi harus melayani masyarakat.

Beberapa kewajiban yang harus diikuti oleh setiap Pegawai Negeri Sipil menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 adalah sebagai berikut :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan atau diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil.
4. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
5. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum.

7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, perasatuan, Korps Pegawai Negeri Sipil.
10. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang Keamanan, Keuangan dan materil.
11. Mentaati ketentuan jam kerja.
12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.
14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
15. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
16. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
17. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
18. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
19. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.

20. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
21. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesame Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan.\
22. Hormat menghormati antara sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan.
23. Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat.
24. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
25. Mentaati perintah kedinasan dan atasan yang berwenang.
26. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

### 4.2.6 Pendelegasian Wewenang Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Pendelegasian wewenang berkaitan erat dengan delegasi, delegasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sedangkan wewenang merupakan proses dimana atasan mendelegasikan wewenang ke bawahan .

Implementasi Simtan yang dilaksanakan oleh Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu sendiri.

Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Sumber Daya kebijakan yang dapat menentukan Implementasi Kebijakan Simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat antara lain sumber daya manusia, sumber daya manusia di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat belum semuanya menguasai komputerisasi atau yang ahli dalam komputerisasi. Sumber daya finansial atau modal, yang tersedia belum mencukupi untuk membiayai sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan Simtan. Sumber daya waktu yang diperlukan dalam Implementasi Kebijakan Simtan sudah mencukupi.

Berdasarkan hasil penelitian, Secara umum Sumber Daya yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam proses Implementasi Kebijakan Simtan telah berjalan cukup baik, tetapi peneliti melihat pada unsur Sumber Daya Manusianya masih ada kekurangan yaitu belum semuanya aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang menguasai komputer.

Tetapi, dalam upayanya meningkatkan mutu SDM, pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan berbagai pelatihan dengan baik.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, proses pendelegasian yang dilakukan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah memenuhi empat prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam proses pendelegasian wewenang yaitu (a) Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan (b) Pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas (c) Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab (d) Pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. (Handoko, 2003 : 224)

Menurut penjelas di atas pendelegasian ini menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada aparatur bawahan untuk melaksanakan tugas. Pendelegasian ini melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas sesuai fungsi nya. Penerimaan delegasi baik implisit atau eksplisit mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sangat besar bagi penerima delegasi. Sehingga pendelegasi menerima pertanggungjawaban kepada aparatur bawahan hasil nya yang dicapai sesuai yang diinginkan

### 4.2.7 Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Meningkatnya kebutuhan organisasi akan penyediaan informasi data-data pertanian di masyarakat memungkinkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat harus mengembangkan struktur organsasi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, dengan meningkatnya kapasitas organisasi diperlukan juga kapasitas sumber daya manusianya.

SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini karena manusia merupakan unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menunjang implementasi kebijakan. SDM yang berkualitas adalah aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan (keahlian) dan sikap yang baik dalam melakukan pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum SDM yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam proses implementasi kebijakan Simtan telah berjalan cukup baik, tetapi peneliti melihat kekurangan, yakni belum semua aparatur dinas pertanian tanaman pangan menguasai Komputer. Upaya untuk meningkatkan kemampuan para pegawai di bidang komputer mulai dilaksanakan secara bertahap.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, berbagai upaya yang dilakukan adalah, *pertama*.

Pengadaan Pegawai. Meskipun dalam pengadaan pegawai, Dinas Pertanian Tanaman Pangan tidak dilibatkan karena merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pegawai yang lulus seleksi dipastikan sesuai dengan kriteria yang elah ditetapkan. *Kedua*, melakukan pengembangan pegawai, yakni melalui studi lanjut bagi para pegawai, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan-pembinaan. Semua upaya itu dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme para pegawai.

*Ketiga*, melakukan tindakan disiplin pegawai. Kegiatan ini dilakukan melalui pemberian teguran dan pemecatan terhadap pegawai yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bagi pegawai yang berprestasi diproses kenaikan pangkatnya.

*Keempat*, pemberian gaji, baik gaji pokok, kenaikan gaji berkala dan tunjangan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

### 4.2.8 Budaya Organisasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan organisasi dalam menjalankan layanan kepada publik. Budaya organisasi yang positif turut andil dalam mencapai keefektifan organisasi. Artinya budaya organisasi akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuannya.

Tingkat efektifitas pekerjaan individu akan mendorong tercapainya efektifitas kelompoknya, dan pada gilirannya akan dapat mencapai efektifitas organisasi. Jika seorang pegawai bekerja secara efektif maka akan mengakibatkan efektifitas kerja di kelompoknya atau bagiannya, selanjtnya efektifitas kelompok yang dicapai akan membentuk efektifitas organiasasi.

Budaya organisasi yang berkembang di jajaran pemerintahan hampir sama pada semua instansi pemerintahan, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat cenderung hubungan atasan dan bawahan bersifat formal dan paternalistik.

Budaya organisasi yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang kekeluargaan dan disiplin para pegawainya memungkinkan tumbuhnya etos kerja yang tinggi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penciptaan iklim kerja yang kondusif telah berjalan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Kondisi ini tampak pada suasana para pegawai yang penuh kekeluargaan dan semangat di kalangan para pegawai. Meskipun bersifat kekeluargaan namun jika ada pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur dan system yang berlaku, pimpinan memberikan teguran, baik lisan dan tertulis.

### 4.3 Penggerakan dan kepemimpinan Sistem Informasi Manajemen Pertanian dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Setelah struktur organisasi terbentuk dan dijalankan berikut personilnya, tahapan dan proses manajemen berikutnya adalah menggerakkan seluruh aparat untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Peran kepemimpinan juga tidak kalah pentingnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Teori-teori manajemen menyimpulkan bahwa, para pimpinan dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan prestasi suatu organisasi. Baik buruknya sikap dan perilaku pimpinan akan banyak mempengaruhi kinerja organisasi daalam mencapai tujuannya.

Referens-referensi tentang manajemen membuktikan bahwa, gaya kepemimpinan turut menentukan kemampuan pimpinan untuk menggerakkan bawahannya mencapai tujuan organisasi. Meskipun tidak ada satu gaya kepemimpinan yang tidak memiliki kelebihan dan kekurangan. Gaya kepemimpinan tersebut terdiri atas, gaya otoriter, demokratis, liberal, transformasional, dan lain-lain.

Penerapan gaya kepemimpinan yang tepat akan mendorong bawahan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pada saat yang tepat, pimpinan dapat menerapkan gaya otoriter jika bawahan sulit diatur dan membawa kepentingannya masing-masing. Gaya demokratis juga akan dirasakan tepat jika diterapkan pada kondisi tertentu. Sehingga gaya kepemimpinan akan

berlaku secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan karakteristik sumber daya manusia yang dimiliki.

### 4.3.1 Efektivitas Kepemimpinan Sistem Informasi Manajemen Pertanian dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki sifat-sifat dan kualitas tertentu yang diinginkan, misalnya kharismatik, berpandangan ke depan, intensitas dan keyakinan diri. Efektivitas kepemimpinan akan banyak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan.

Peran seorang pemimpin untuk penanganan terhadap masalah yang dihadapi para aparatur mengenai suatu interaksi bisa dikendalikan. Karena pemimpin merupakan penggerak terhadap bawahannya (pegawai) untuk menentuakan arah dan tujuan, memberikan bimbingan dan motivasi.

Pemimpin memiliki peran yang paling dominan dalam meningkatkan profesionalisme pegawai, karena seorang pemimpin mempunyai kendali untuk mengatur pegawainya dalam melakukan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Pemimpin yang berada di Sub Bagian Perencanaan dan Program di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat merupakan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program, peranannya sangat besar dalam mengarahkan dan mengendalikan para pegawai sehingga mereka dapat bekerja dengan baik.

Kepemimpinan yang efektif mampu mendorong para pegawai dalam melakukan pekerjaan Simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Implikasinya akan terlihat dari kinerja para pegawai yang selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Kepemimpinan aparatur melalui Simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari peran dan pengaruh seorang pemimpin terhadap integrasi seorang pegawai dengan tujuan lembaga sangat besar. Umumnya pegawai bekerja dengan baik saat ada seorang pemimpin disekitar dia. Pemimpin di sini tidak selalu kepala di suatu bagian. Pemimpin bisa jadi orang yang dijadikan panutan seorang pegawai, bisa juga orang yang ditunjuk oleh seorang kepala bagian untuk mempimpin yang lain, bahkan bisa juga pemimpin adalah pegawai itu sendiri.

Peranan Kepala (sebagai pemimpin) Sub Bagian Perencanaan dan Program di Dinas pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, ingin bisa mengarahkan para pegawainya harus mempunyai sifat dan jiwa yang dapat dijadikan pedoman bagi pegawainya. Pertama harus wibawa, karena kewibawaan seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan, karena pemimpin yang berwibawa dapat dipatuhi oleh pegawainya. Kedua, Kepala Sub Bagian (sebagai pemimpin) Perencanaan dan Program di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat harus berani. Karena pemimpin yang berani artinya, berani bertindak untuk mengambil keputusan dan bertanggungjawab mengenai resiko yang akan terjadi atas tindakan yang

dilakukannya. Ketiga rajin dan tidak mudah menyerah, karena pemimpin merupakan contoh bagi pegawainya. Apabila pemimpinnya rajin, bawahannya pun akan meniru atau mencontoh atasannya dalam bekerja dan bergerak secara cepat terhadap suatu pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai tersebut, guna menuju tujuan yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup dari kepemimpinan dalam sebuah pekerjaan *e-Government* akan dihadapkan pada kemampuan untuk mengelola tiga hal, yakni :

1. Beragam tekanan politik yang terjadi terhadap proyek atau pekerjaan *e-Government* yang berlangsung baik dari kalangan yang optimis maupun pesimis.
2. Bermacam-macam sumber daya yang dibutuhkan dan dialokasikan oleh proyek *e-Government* yang bersangkutan, misalnya sumber daya manusia, financial, informasi, peralatan, fasilitas, dan lain-lain.
3. Sejumlah kepentingan dari berbagai kalangan terhadap pekerjaan *e-Government* yang dijalankan.

### 4.3.2 Motivasi Pegawai dalam Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Kemampuan pimpinan untuk memberikan motivasi kepada bawahan, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi kepada para bawahannya akan menentukan efektivitas kepemimpinan. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Karena

pimpinan tidak bekerja sendirian, melainkan melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Motivasi juga merupakan subjek yang membingungkan karena motif tidak dapat diamati dan diukur secara langsung, tetapi harus disimpulkan dari perilaku orang yang tampak.

Berkaitan dengan pembahasan motivasi, muncul beberapa teori motivasi yang berkaitan erat dengan kebutuhan manusia, dari yang paling dasar sampai kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya. Karena setiap orang akan meningkat motivasi kerjanya bila kebutuhannya terpenuhi, karena pada umumnya setiap orang yang bekerja berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Menerapkan motivasi terhadap aparatur di Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, ada dua cara yaitu *Pertama*, motivasi langsung. Motivasi yang diberikan baik materil (uang) maupun nonmateril (penghargaan) secara langsung pada setiap aparatur untuk memenuhi kebutuhan dan tercapainya kepuasan. Pemberian motivasi ini bisa dalam bentuk ucapan, pujian, penghargaan dan bonus berupa uang. *Kedua* motivasi tidak langsung merupakan pemberian motivasi dalam bentuk fasilitas-fasilitas pendukung dalam menunjang semangat kerja atau kelancaran tugas aparatur dalam bekerja. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai untuk mewujudkan profesional pegawai.

Karakteristik pegawai dapat dilihat melalui Simtan dengan mengetahui data-data Pertanian, sehingga dalam pemberian tugas seorang pegawai bisa diketahui bahwa pegawai tersebut akan termotivasi dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Kepemimpinan seorang pegawai dapat dipantau dari hasil kerja dan pelatihan yang dimilikinya. Data-data tersebut terdokumentasikan di Simtan. Integritas pegawai terkait dengan tingkat kepemimpinannya pun dapat memperhatikan data-datanya di Simtan. Peran kepemimpinan untuk memperhatikan pegawainya dalam penggunaan Simtan.

### 4.3.3 Etika Pegawai dalam Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Setiap profesi memiliki etika profesi, termasuk di dalamnya etika dalam pemerintahan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada setiap kementerian.

Etika pegawai di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. (Korpri). Kode etik tersebut selalu diingatkan oleh pimpinan pada setiap kesempatan upacara dan pembinaan pegawai.

Sapta Prasetya Korpri berisi 7 (tujuh) poin yang senantiasa harus dijunjung oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, yakni :

a. Kepatuhan kepada Pancasila dan UUD 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Ketaatan dalam membela pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Bangsa, Negara serta memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
d. Melaksanakan tugas bekerja dengan jujur, berdisiplin, bersemangat, bertanggungjawab, dan penuh pengabdian.
e. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
f. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.
g. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, memupuk keutuhan dan kesetia-kawanan serta meningkatkan mutu pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Penjabaran etika pegawai juga dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, didalamnya mengatur tentang kewajiban-kewajiban, apa yang boleh dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai serta sejumlah sangsi atau hukuman yang diterima oleh pegawai negeri jika melakukan pelanggaran. Secara rinci larangan yang tidak boleh dilanggar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil.
2. Menyalahgunakan wewenangnya.
3. Tanpa ijin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk Negara asing.
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara.

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
7. Melakukan tindakan yang bersifat negative dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil besangkutan.
9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali kepentingan jabatan.
10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
11. Melakukan suatu tindakan sengaja atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

14. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau peranan dari kantor/instansi pemerintah.
15. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.
16. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya jumlah dan pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan jalannya perusahaan.
17. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta baik yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I.
18. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

### 4.3.4 Mutu Pekerjaan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam kaitannya dengan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pertanian Kepada masyarakat

Mutu pekerjaan mengacu pada standarisasi yang telah ditetapkan. Pekerjaan yang berkaitan dengan Simtan mengacu pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Jika pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang telah dietapkan maka dapat dipastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh para

pegawai dapat bermutu, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masayarakat, khususnya masyarakat tani.

Pengawasan terhadap mutu pekerjaan dilakukan melalui pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Subag Perencanaan dan program di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat bahwa Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan kebijakan Simtan, karena manusia yang akan melaksanakan kebijakan. Ciri – ciri mutu SDM, misalnya dalam proses produksi, dapat dilihat dari berbagai perspektif, yakni input, proses, dan output. Input mutu SDM yang tersedia sangat menentukan mutu SDM pada kegiatan proses. Perspektif input dan proses sangat menentukan keberhasilan output produksi (produktifitas kerja).

Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e – literacy* masyarakat. Sumber Daya Manusia baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *e – Government* marupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan suatu sistem.

Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *Pengembangan e – Government* yang di dalamnya memuat 7 strategi pengembangan suatu sistem melalui SDM yang berkualitas :

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e – literacy*), baik dikalangan pemerintah dan pemerintah daerah otonom maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi *(information society).*
2. Pemanfaatan sumber daya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah / masyarakat.
3. Pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintahan agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan *e – Government*.
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanaan publik, maupun pimpinan unit / lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan / keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.
5. Peningkatan kapasitas penyelenngaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi

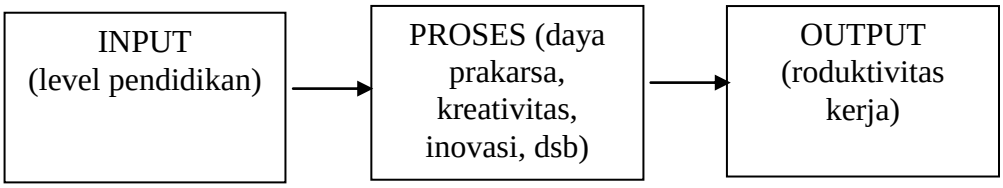
kesenjangan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi antar daerah.

6. Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan *e – Government* melalui sosialisasi / penjelasan mengenai konsep dan program *e – Government*, serta contoh keberhasilan (*best practice*) pelaksanaan *e – Government*.
7. Peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan / apresiasi kepada seluruh SDM bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan *e – Government.*

Ketujuah faktor diatas adalah unsur pendukung dalam meningkatkan mutu SDM, di dalam implementasi Simtan yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat diharapkan ketujuh unsur tersebut dapat membantu dalam proses implementasinya.

Ciri – ciri mutu SDM, misalnya dalam proses suatu produksi, dapat dilihat dari berbagai perspektif, yakni input, proses, dan output: input mutu SDM yang tersedia sangat menentukan mutu SDM pada kegiatan proses. Dari gambar di bawah ini dapat dikatakan bahwa potensial awal karyawan yang masih bersifat potensial (pasif) menjadi unsur riil ketika dimanfaatkan dalam suatu proses produksi, dengan dukungan faktor lain. Unsur riil inilah yang merupakan input berikutnya yang mampu menciptakan suatu produktivitas kerja. Secara lebih ringkas dapat dilihat pada gambar di bawah ini

**Gambar 4.1**
**Contoh Rangkaian Tentang Mutu Input (SDM), Proses, dan output**




Sumber : Mangkuprawira (2007:8)

Kriteria manusia yang dapat menunjang keberhasilan Simtan, yaitu berpotensi, mempunyai keterampilan, pintar, terdidik dan terlatih serta siap sebagai pelaksana kebijakan. Sumber Daya Manusia dalam Simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sudah bisa dikatakan hampir memenuhi standar. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya pendidikan ikatan Dinas secara berkesinambungan bagi aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti kuliah dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh tingkat pusat atau provinsi. Sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan implementasi Simtan, berdasarkan hasil wawancara adalah Sumber Daya Manusia, Modal dan Waktu.

SDM merupakan hal yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan Simtan, karena manusia adalah sebagai unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan Simtan adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi yang handal. Potensi yang handal tersebut dapat dilihat berdasarkan kriteria-kriteria, kriteria yang dimaksud ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Kriteria yang diperlukan adalah mereka yang ahli

dalam bidang komputer dan mampu untuk mengoperasionalisasikannya serta ahli dalam administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, hampir sesuai dengan kriteria tersebut masih banyak mereka yang tidak menguasai komputerisasi hanya sebagain staf yang ahli dalam operasionalisasi komputer. Sumber daya manusia yang ada di Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat belum dapat dikatakan memadai, karena masih banyak yang belum dapat mengusai bidang komputer yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan Simtan. Oleh karena itu pelaksanaan Simtan belum terlaksana dengan maksimal, untuk mengatasinya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat melakukan langkah penyeleksian pegawai yang ahli dalam bidang komputer yang dapat mendukung keberhasilan Simtan..

SDM yang menguasai komputer atau ahli komputer hanya sebagian saja, jumlah tenaga ahli komputer belum memadai dengan yang diperlukan. SDM yang diperlukan adalah mereka yang ahli komputer karena akan dijadikan sebagai operator atau tenaga ahli komputerisasi. Oleh karena itu adanya kriteria khusus tersebut, karena masih adanya kendala pada bagian pengoperasionalan komputer. Selanjutnya akan ada bimbingan dari pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program kinerjanya, jadi mereka akan diberikan petunjuk terlebih dahulu agar mereka mengerti pengoprasionalisasiannya setelah itu mereka akan diberikan kesempatan untuk mempraktikannya.

Upaya yang dilakukan oleh Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam pengadaan menyediakan ahli komputerisasi diantaranya adalah dengan memperkerjakan tenaga lepas yang berkompeten dalam pengoperasian komputerisasi yang berjumlah 5 orang. Selain harus ahli dalam bidang komputer tentunya sumber daya manusia yang dapat mendukung keberhasilan Simtan, mereka juga harus memahami mengenai administrasi jadi tidak hanya pintar dalam bidang komputer saja melainkan harus bisa dalam hal administrasi.

SDM yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai keberhasilan pelaksanaan Simtan, sumber daya manusia yang diperlukan adalah yang mempunyai keahlian atau yang mampu dalam bidang komputer. Hal tersebut dikarenakan akan sesuai dengan kenyataan yang diperlukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, karena dalam pelaksanaan Simtan belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dalam berbagai hal, diantaranya adanya keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mendukung kebeberhasilan pelaksanaan Simtan, disamping itu juga adanya keterbatasan-keterbatasan modal.

### 4.3.5 Kerja sama tim Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Sebagai Salah Satu Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Kerja sama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Tanpa kerja sama yang baik antara satu pegawai dengan pegawai yang lain tujuan organisasi tidak dapat diwujudkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, kerja sama antar karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan Simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat cukup soild, sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dicapai.

Kekompakan dan kerja sama yang baik akan meningkatkan kinerja yang optimal, dimana antara sesama aparat akan saling bekerja sama mengatasi kesulitan secara bersama satu sama lain. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan dakan semakin mudah diselesaikan. Kerja sama yang berlangsung tidak hanya berkisar pada sesame bawahan, melainkan atasan dengan bawahan. Kesulitan yang dihadapi bawahan akan dibantu oleh atasan, dan sebaliknya.

### 4.3.6 Komunikasi Organisasi Antar Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Sebagai Salah Satu Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Komunikasi yang efektif terjadi dimana saja, mentangkut penyampaian berita dari seseorang kepada orang lain secara akurat. Efektifitas komunikasi dipengaruhi oleh beberapa factor, yakni saluran komunikasi formal, struktur organisasi, spesialisasi jabatan dan pemilikan informasi (Raymond V. Lasikar dalam Handoko, 2003 : 277).

Saluran komunikasi formal mempengaruhi efektifitas komunikasi dalam dua cara, pertama, liputan saluran formal semakin melebar sesuai perkembangan dan pertumbahan organisasi. Kedua, saluran komunikasi formal dapat menghambat aliran informasi antar tingkat-tingkat organisasi.

Struktur wewenang organisasi mempunyai pengaruh yang sama terhadap efektifitas organisasi. Perbedaan kekuasaan dan kedudukan dalam organisasi akan menentukan pihak-pihak yang berkomunikasi dengan seseorang serta isi dan ketapatan dalam berkomunikasi.

Spesialisasi jabatan biasanya akan mempermudah komunikasi dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Para anggota suatu kelompok kerja yang sama akan cenderung berkomunikasi dengan istilah, tujuan, tugas, waktu, dan gaya yang sama. Komunikasi antara kelompok-kelompok yang berbeda akan cenderung dihambat.

Pemilihan informasi menyebabkan individu mempunyai informasi khusus dan pengetahuan tentang pekerjaan-pekerjaan mereka. Sedangkan berkaitan jaringan komunikasi, organisasi dapat merancang jaringan atau struktur komunikasi dengan berbagai cara. Misalnya jaringan komunikasi dirancang kaku, dimana bawahan dilarang berbicara dengan siapapun kecuali dengan atasannya langsung. Sebaliknya jaringan komunikasi dirancang lebih bebas.

Interaksi adalah proses dimana masing – masing individu mangadakan kontak baik itu lisan ataupun tulisan. Komunikasi terjadi jika ada interaksi diantara dua atau lebih individu, dalam hal ini proses interaksi antar aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat terjadi setiap hari. Karena mereka bekerja dalam lingkup organisasi.

Organisasi merupakan suatu kesatuan unit kerja yang didalamnya diwajibkan terjalinnya interaksi. Tanpa adanya interaksi mustahil akan adanya transformasi informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Subag Perencanaan dan Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Interaksi yang dilakukan oleh seluruh karyawan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat adalah dalam hal pengumpulan data.

Peran seorang pemimpin untuk penanganan terhadap masalah yang dihadapi para aparatur mengenai suatu interaksi bisa dikendalikan. Karena pemimpin merupakan penggerak terhadap bawahannya (pegawai) untuk menentuakan arah dan tujuan, memberikan bimbingan dan motivasi.

Interaksi aparatur melalui Simtan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Sub Bagian Perencanaan dan Program, merupakan cara untuk

menyatukan para aparatur, baik aparatur yang baru ditempatkan maupun aparatur yang melalakukan program pelatihan di suatu tempat. Penyatuan sumber daya aparatur merupakan penyesuaian pola pikir aparatur untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai kepentingan bersama. Penyatuan aparatur memang tidak mudah dilakukan, membutuhkan waktu yang cukup lama supaya aparatur tersebut mau bekerja sama dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Karena para aparatur tersebut mempunyai pikiran, perasaan harga diri, dan sifat yang berbeda serta mempunyai latar belakang perilaku keinginan dan kebutuhan yang berbeda ke dalam organisasi.

Proses komunikasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakan simtan dalam meningkatkan pelayanan informasi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, antara lain melalui transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, Penyampaian informasi ditujukan kepada sasaran yang tepat. Kejelasan, Penyampaian informasi dengan jelas, belum dapat dikatakan baik, masih terdapat aparatur yang tidak mempergunakan aplikasi Simtan sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan mereka. Konsistensi, Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sudah konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum Interaksi Komunikasi yang terjadi antar aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam proses implementasi kebijakan Simtan belum dapat dikatakan baik, ini dibuktikan dengan adanya aparatur yang belum paham tentang Simtan itu sendiri. Ini

disebabkan karena kejelasan dalam penyampaian informasi belum berjalan merata.

Selain itu, komunikasi diantara aparatur juga semakin efektif, sebagaimana dinyatakan oleh Hanafi (1997 : 431 – 433), yakni menyangkut komunikasi baik vertical maupun horizontal. Komunikasi vertical merupakan bagian penting dlam suatu organisasi.Komunikasi vertical atau komunikasi ke atas biasanya bersifat penyampaian laporan. Sedangkan komunikasi dari atasan ke bawahan berkaitan dengan penyampaian informasi dan instruksi kepada bawahan. Hasil-hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa komunikasi dari bawahan ke atasan biasanya cenderung tidak efektif bila dibandingkan dengan komunikasi dari atasan ke bawahan.

Komunikasi horizontal terjadi antar sesama aparatur yang setingkat, misalnya kepala bagian yang satu dengan kepala bagian yang lain. Komunikasi ini mengikuti aliran kerja dalam organisasi.

### 4.3.7 Kemampuan Negosiasi Sebagai Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Sumber daya kebijakan, merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya kebijakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

diarahkan kepada pembentukan birokrasi bermartabat. birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam arti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Makmur dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam arti birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi, memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain melakukan kebijakan yang sifatnya normatif, untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur dan untuk menumbuhkan sikap *entrepreneur* serta kompetisi yang sehat diantara aparatur. Selaim itu juga ditawarkan pola tender jabatan (*job tender*) kepada aparatur yang dinilai memiliki kemampuan untuk menduduki suatu jabatan. Kebijakan ini dilakukan mengingat selama ini, kebijakan mutasi aparatur masih menjadi sumber kerisauan jajaran aparatur, terutama bagi aparatur yang sudah menduduki jabatan. Indikasi *like and dislike* senantiasa menjadi isu yang menyertai setiap mutasi pegawai. Bila tidak dikelola dengan baik, isu ini dapat mengancam solidaritas serta soliditas aparatur. Bahkan tidak jarang mutasi dijajaran aparatur dapat berakibat buruk secara politis dan menjadi medan tarik menarik antara kepentingan politis dengan kepentingan profesional aparatur itu sendiri.

Pengembangan aparatur bertujuan agar aparatur dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan

sumber daya aparatur diterapkan, supaya aparatur mendapatkan pelatihan khusus dalam implementasi kebijakan Simtan. Dalam pelaksanaannya kebijakan Simtan sangat membutuhkan aparatur yang ahli dalam bidang teknis untuk mengoperasionalkan dan mengaplikasikan data-data yang tersimpan dalam *server data base.*

Sumber daya informasi atau infrastruktur, merupakan salah satu sumber daya penentu keberhasilan implementasi kebijakan Simtan. Sumber daya informasi/infrastruktur di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat bersumber dari anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan salah satu usaha pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pelayanan informasi.

Sumber daya waktu, sumber daya waktu merupakan bagian dari kepastian pelayanan, dengan ketepatan waktu yang tepat maka respon aparatur terhadap kepuasan pelayanan akan meningkat. Waktu merupakan acuan dari lamban atau tidaknya proses pelayanan. Sebagai upaya reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan percepatan pelayanan kepada aparatur pada kususnya. Sumber daya kebijakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat meliputi: sumber daya aparatur, sumber daya informasi atau infrastruktur dan sumber daya waktu.

Kemampuan negosiasi, baik intern maupun ekstern sangat diperlukan untuk mewujudkan organisasi yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 4.4 Peranan Pengendalian dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Sekurang-kurangnya terdapat empat kegiatan utama yang dilakukan dalam kegiatan pengendalian, yakni desain pengendalian, Sistem Informasi Manajemen(SIM) , Pengendalian anggaran/keuangan, dan audit.

Pengendalian yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat mengacu pada *Standard Operation Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dan penyelewengan langsung dilakukan koreksi dan perbaikan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

### 4.4.1 Desain Pengendalian dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Kegiatan pengendalian merupakan yang tidak terpisahkan dari proses manajemen**,** karena dengan pengedalian dapat dilihat seberapa besar penyimpangan yang dilakukan sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pimpinan yang baik sangat memerlukan pengendalian yang efektif. Pengendalian yang efektif dapat memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga pengendalian dan perencanaan sangat berpasangan. Artinya, pengendalian tidak dapat dilaksanakan jika sebelumnya tidak disusun perencanaan, karena pedoman untuk melakukan pengendalian bersumber dari perencanaan.

Sistem pengendalian yang baik memerlukan akurasi dan kecepatan informasi sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat dideteksi sedini mungkin. Untuk itu diperlukan system informasi manajemen yang efisien dan efektif. Pengendalian juga harus dilakukan untuk semua lapisan organisasi, bukan hanya untuk pimpinan saja.

Adapun proses pengendalian mencakup empat kegiatan antara lain :

(1) Menetapkan standard an metode pengukuranya;
(2) Melakukan pengukuran prestasi;
(3) Membandingkan apakah prestasi yang dicapai sesuai dengan standarnya;
(4) Melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.(Hanafi, 1997 : 449-450).

Langkah-langkah diatas sudah ditempuh oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dengan menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP), sehingga pengukuran hasil yang dicapai akan semakin lebih mudah.

Pengendalian dilakukan dengan membandingkan antara SOP yang telah ditetapkan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Jika terjadi penyimpangan, maka dilakukan perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan Standar yang telah ditentukan.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, desain pengendalian telah dibuat oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada SOP yang telah ditetapkan.

Pengendalian yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat hampir mendekati criteria yang telah ditetapkan secara teoritis sebagai pengendalian yang efektif. (Hanafi, 1997 : 458 – 459), antara lain :

a. Disesuaikan dengan rencana dan struktur organisasi. Sistem pengendalian yang baik ditujukan untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan.
b. Disesuaikan dengan kepentingan pimpinan. Pengendalian yang baik sesuai dengan karakteristik pimpinan yang mengawasi atau diawasi.
c. Bersifat ekonomis. Sistem pengendalian memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Artinya, manfaat yang diperoleh dari system pengendalian lebih tinggi dari biaya yang telah dikeluarkannya.
d. Akurat. Informasi yang akurat diperlukan untuk sebuah pengendalian yang baik.
e. Tepat waktu. Informasi harus datang pada saat yang dibutuhkan. Jika informasi dating terlambat maka tidak akan dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang.
f. Fleksibel. Pengendalian harus memprtimbangkan kemungkinan perubahn-perubahan yang berjalan secara cepat, sehingga harus fleksibel dalam pelaksanaanya.
g. Objektif dan Mudah Dipahami. Sistem pengendalian yang baik harus jelas dan objektif. Kejelasan harus mempermudah aparat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan.
h. Mengarah pada perbaikan. Sistem pengendalian yang baik harus sampai pada pihak-pihak yang bertanggung jawab, sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

i. Memfokuskan pada titik strategis. Pengendalian yang baik memfokuskan pada titik strategis dimana kemungkinan penyimpangan terjadi cukup besar atau penyimpangan yang terjadi akan mengakibatkan kerugian yang besar.

### 4.4.2 Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Kemajuan tekonologi dan informasi merupakan realita yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari di era modern. Pesatnya perkembangan teknologi informasi akan membawa dampak perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang menginginkan adanya kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju merupakan peluang bagi setiap instansi dan lembaga pemerintahan untuk dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam rangka meningkatkan pembangunan ditingkat nasional maupun daerah. Upaya untuk mengefektifkan penggunaan teknologi dan informasi dilembaga pemerintahan merupakan upaya dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi.

Teknologi informasi yang berbasis komputerisasi, saat ini telah menyederhanakan pekerjaan menganalisis jumlah data yang luas, dan teknologi

informasi berbasis komputer tersebut dapat memudahkan dalam memanajemen sumber daya aparatur. Proses pengembangan sumber daya aparatur berupa proses pengembangan pegawai, pembinaan pegawai, serta sampai pencatatan para pegawai. Dengan adanya pengembangan sistem informasi di suatu pemerintahan akan memudahkan para pegawai dalam menyimpulkan data dan informasi dengan lebih baik.

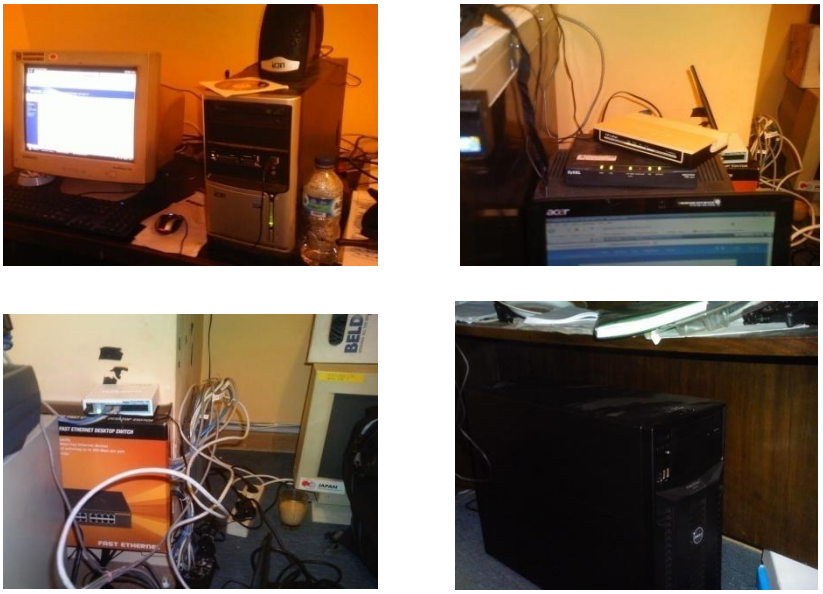
Informasi saat ini merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap masyarakat seperti halnya manusia membutuhkan tenaga untuk hidupnya. Informasi memungkinkan masyarakat dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan yang sedemikian cepat dan kompleks. Tentu saja hasil dari teknologi ini sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa modern harus bersikap dalam melayani masyarakat.

Simtan adalah kumpulan data (data gathering) dari hasil penyelenggaraan dibidang pertanian di Provinsi Jawa Barat yang dihasilkan dari oprator setiap bagian data informasi pertanian dan sebuah kelengkapan pengelolaan dari proses-proses yang menyediakan informasi guna mendukung operasi-operasi dan pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi. Hal ini merupakan suatu inovasi bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam penerapan *e-Government* untuk meningkatkan pelayanan informasi.

Dasar hukum yang di jadikan landasan dalam pembuatan Simtan adalah Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Nomor 531.1/kep/242/PR/2010 tentang pembentukan kelompok kerja pusat data dan informasi berbasis teknologi informasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi

Jawa Barat. Landasan hukum inilah menjadi acuan dengan di bentuknya Simtan tersebut.

**Gambar 4.2**
**Server SIMTAN**



Sumber: Subag Perencanaan dan Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang menunjang dalam pembuatan SIMTAN tersebut. Sarana dan prasarana tersebut meluputi: *Softwear, hardware, networking, SOP (Standar Oprasional Prosedur)* sedang di revisi, dan SDM (Sumber Daya Manusia). Sarana dan prasarana didalam pelaksanaanya telah tersedia dan sangat mendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Sarana dan prasarana sudah mendukung tetapi tidak ditunjang dengan SDM untuk membuat berita informasi masih terbatas.

Pelayanan Pemerintahan daerah merupakan suatu informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh seluruh mayarakat. Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus mewujudkan suatu pelayanan sistem informasi. Pelayanan sistem informasi dilakukan karena suatu keharusan terutama didalam Pemerintahan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja para aparatur. Penggunaan sistem teknologi informasi dalam bidang Pemerintahan salah satunya digunakan untuk kelancaran komunikasi antar Lembaga-lembaga, Dinas, Instansi dan Badan. Komunikasi antar Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah serta bagi masyarakat luas supaya terjalin suatu sistem kepemerintahan yang efektif, efisien serta cepat dalam melayani masyarakat luas. Teknologi sistem informasi mampu menyediakan ruang informasi pelayanan publik yang dapat diakses oleh siapapun, dimana pun secara mudah.

Kemajuan teknologi dan informasi pemerintah provinsi dapat dilihat dari pelayanan yang sudah berbasis pada penggunaan teknologi komputer, yaitu dengan menerapkan konsep teknologi pemerintahan yang sering disebut *e-Government*. Penerapan *e-Government* merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya yang lebih efektif dan efisien.

Pengembangan teknologi pada aparatur Pertanian Tanaman Pangan Provinsi jawa Barat terus dikembangkan. Saat ini Teknologi Informasi mulai dikembangkan agar dapat membantu pengembangan kinerja aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan

informasi yang semakin dominan di dunia. Teknologi informasi diharapkan dapat memberikan manfaat pada permasalahan pertanian yang ada di Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Simtan adalah kumpulan data (data gathering) dari hasil penyelenggaraan dibidang pertanian di Provinsi Jawa Barat yang dihasilkan dari oprator setiap bagian data informasi pertanian dan sebuah kelengkapan pengelolaan dari proses-proses yang menyediakan informasi guna mendukung operasi-operasi dan pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi. Hal ini merupakan suatu inovasi bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam penerapan *e-Government* untuk meningkatkan pelayanan informasi.

Simtan saat ini merupakan sumber daya utama, yang mempunyai nilai strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai daya saing serta kompetensi utama sebuah organisasi dalam menyongsong era Informasi ini. Serta sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam menjalankan Simtan tersebut. Apabila sarana dan prasarana tidak di dukung maka sistem informasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dalam hal sumber daya nya Dinas Pertanian selaku admin dalam sistem tersebut selalu melakukan pelatihan untuk meningkatkan kuliatas SDM dalam penggunaan sistem informasi tersebut.

### 4.4.3 Pengendalian Anggaran di Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Implementasi kebijakan akan terlaksana jika didukung oleh sumber daya anggaran yang cukup. Sumber daya anggaran di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat menjadi sumber kewenangan Sub. Bagian Keuangan. Kewenangan bagian Keuangan untuk mengurus sumber daya anggaran sudah tepat. Hal ini dikarenakan anggaran harus dikelola oleh para aparatur yang mengetahui benar-benar tentang bidang keuangan, agar sumber daya anggaran dapat digunakan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian.

Sumber daya anggaran yang dikeluarkan oleh bagian Keuangan mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA adalah suatu daftar yang berisikan anggaran yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Adanya DIPA akan memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pelaksanaan Sumber daya anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

*Pertama*, Sumber daya anggaran gaji, honorarium dan tunjangan, merupakan anggaran bulanan yang harus diberikan kepada aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Kedua, sumber daya anggaran operasional dinas. Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan anggaran untuk

penyelenggaraan operasional dinas, seperti : anggaran untuk pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian, misalnya untuk pendidikan dan pelatihan aparatur, anggaran untuk perawatan simtan, misalnya untuk pembelian komputer dan printer, pemasangan dan pembayaran internet, pembelian mesin telepon dan fax, pembelian dan pemeliharaan kendaraan.

Anggaran untuk penyelenggaraan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, misalnya untuk pembelian buku pertanian, lemari buku dan rak arsip. Pengawasan pelaksanaan anggaran keuangan dilakukan oleh pimpinan dan pihak luar yakni Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, segala penyimpangan di bidang keuangan dapat diminimalisasi.

Perlunya pengawasan anggaran secara oprimal, sesuai dengan pernyataan Indrajit (2006 : 66) bahwa, kekuatan sumber daya financial yang dianggarkan pada sebuah pekerjaan e-Government merupakan salah satu elemnen strategis dan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan e-Government. Bahkan seringkali pekerjaan *e-Government* dianggap hanya pekerjaan sia-sia dan tidak bermanfaat bagi kepentingan pemerintah dan publik.

### 4.4.4 Audit dalam rangka Optimalisasi Kinerja pada Sistem Informasi Manajemen Pertanian Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan Pelayanan Informasi Pertanian Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Komponen yang keempat dalam pengendalian adalah audit. Audit dilakukan tidak hanya pada penggunaan sumber daya anggaran melainkan pada semua bagian dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Audit dilakukan pada komponen kepegawaian (Sumber Daya Manusia), sumber daya anggaran, dan sarana prasarana.

Pemantauan kerja melalui Simtan bertujuan untuk mempermudah pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini perlu dilakukan agar kinerja yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keteraturan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kerja dapat didokumentasikan dengan rapi. Sehingga data-data pertanian disimpan dalam *server database* dan tidak hilang.

Pemeriksaan keuangan (audit) yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yakni mencakup pemeriksaan internal maupun eksternal. (Hanafi, 1997 : 514). Peemriksaan keuangan internal dilakukan oleh akuntan internal dengan tujuan menjamin sumber daya organisasi digunakan dengan ekektif. Pemeriksaan keuangan internal membantu pimpinan dalam mengevaluasi efektifitas dasn efisiensi organisasi serta mengevaluasi pelaporan keuangan

instansi. Pemeriksaan keuangan secara internal dilakukan oleh Sub-Bagian Keuangan dibawah kendali Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Adapun pemeriksaan keuangan eksternal merupakan proses verifikasi pencatatan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar akuntansi secara umum, jika sudah sesuai diharapkan informasi akuntansi diharapkan tidak menghasilkan informasi yang menyesatkan. Pemeriksaan keuangan secara eksternal melibatkan akuntan public, dan bidang garapan yang ditangani oleh akuntan public biasanya berkisar pada proyek-proyek yang dikerjakan dan tidak bersifat rutin. Penanganannya secara incidental juga dilaksanakan oleh Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP).